

NON URUSAN

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverivikasi
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum PD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahahan desa secara optimal
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa/ kampung berprestasi
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah laporan pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah laporan penetapan penegasan batas desa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedia data pengelolaan aset desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya data penggunaan SISKEUDES
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/ walikota
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah desa/kel Iklim

Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelnggaraan pemerintahan desa
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur desa yang telah dilatih
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	jumlah bumdes yang aktif
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih

Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan penyenggaraan BBGRM
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan

Program : PROGRAM PENATAAN DESA

Indikator Program : Desa yang telah dilakukan Penataan

Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa Yang Telah Dilakukan Penataan di Bidang Pemerintahan Desa
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa

Program : PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Indikator Program : Desa berkembang

Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Berkembang
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan yang dibina